



B U P A T I K A R O
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus mengakomodir surat Pimpinan DPRD Kabupaten Karo Nomor 172/41/DPRD/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Permintaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Permintaan Penambahan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Karo, maka Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan dan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65 / PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2014 Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kabanjahe (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2009 Nomor 01);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016;

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARO NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

1. Merubah besaran tunjangan perumahan anggota DPRD pada Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 sehingga Lampiran I dimaksud secara keseluruhan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
2. Merubah satuan kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Karo dari Orang Bulan menjadi Orang Kegiatan pada Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Karo Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016 sehingga Lampiran II dimaksud secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 29 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR. 08